



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

PERANAN SEKTOR PERTANIAN, PENDAPATAN PERKAPITA, GINI RATIO, DAN POLA KONSUMSI DAMPAK DARI PROSES PEMBANGUNAN EKONOMI

Suwarda

Program Studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 3 Desember 2023
Direvisi, 6 Desember 2023
Diterima, 8 Desember 2023

Email Korespondensi :

suwarda@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia sektor pertanian mendominasi sebagai lapangan kerja sebagian besar masyarakat di pedesaan, sangat besar peranannya dalam menggerakkan pembangunan ekonomi. Kemajuan pembangunan ekonomi ditandai adanya pergeseran kontribusi peran sektor pertanian ke sektor industri dan lainnya. Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara ekonomi ditentukan oleh tingkat pendapatan dan pemerataannya. Selain itu, ditandai adanya pergeseran pola konsumsi dan tingkat konsumsi bahan makanan dalam kalori dan protein. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi sektor pertanian, pendapatan per-kapita, gini ratio, pola konsumsi dan tingkat konsumsi bahan pangan dalam bentuk kalori dan protein dalam mengiringi proses pembangunan. Keberhasilan dalam proses pembangunan ekonomi akan ditandai oleh semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian dan sektor industri semakin meningkat, pendapatan per-kapita semakin meningkat, indek gini ratio semakin menurun pertanda pendapatan semakin merata, pola konsumsi bahan makanan semakin menurun atau rendah dan tingkat konsumsi bahan makanan dalam bentuk kalori dan protein semakin meningkat. Untuk mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi, maksimalisasi dan optimalisasi sektor pertanian, maksimalisasi dan optimalisasi sektor yang mendukung dan erat kaitannya dengan sektor pertanian.

Kata Kunci : *Pembangunan, Pendapatan, Pemerataan, Pola Konsumsi*

1. PENDAHULUAN

Menurut [1], Indonesia dikenal sebagai negara agraris, karena memiliki luas lahan pertanian dan agroklimat yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai usaha sektor pertanian. Di pasar dunia juga dikenal sebagai penghasil beraneka ragam produk hasil pertanian. Ada banyak produk-

produk hasil pertanian Indonesia yang menjadi komoditas andalan di pasar perdagangan dunia. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang cukup besar, selain menyumbang pendapatan nasional dan penyumbang devisa yang cukup tinggi, sebagai bukti bahwa sektor pertanian mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi terhadap pembentukan PDRB pada suatu wilayah. Transformasi ekonomi merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, jasa, dan sektor lainnya, dimana masing-masing perekonomian mengalami transformasi yang berbeda-beda. [2] menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan perubahan struktural. Perubahan peranan masing-masing sektor terhadap pembangunan ekonomi berdampak pada peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat.

Hal yang paling penting dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan, karena beberapa aspek dari tingkat kesejahteraan rumah tangga ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibatasi oleh tingkat pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, maka persentase pendapatan untuk mengkonsumsi bahan pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan tersebut tidak merubah pola konsumsi, maka rumah tangga tersebut adalah sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut dapat merubah pola konsumsi rumah tangga, maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera atau belum sejahtera.

[3] menyatakan bahwa dalam Proses Pembangunan Indonesia selama 10 tahun terakhir dalam bidang ekonomi mengalami perkembangan yang stabil dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 - 2019 sebesar 4%-6%, hanya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97% disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan tingkat konsumsi atau pengeluaran masyarakat turun drastis yang berdampak kepada penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh di atas 4%, tetapi sangat disayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut justru membuat ketimpangan distribusi pendapatan rakyat semakin lebar. Ketimpangan merupakan salah satu permasalahan umum yang dihadapi oleh negara berkembang tak terkecuali Indonesia. Tingginya ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi belum diikuti oleh pemerataan pendapatan setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu penting sekali bahwa dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan juga pemerataannya harus diupayakan. Salim Fauzanul Ihsani dan [4] menyatakan bahwa perekonomian yang berkualitas tidak hanya dilihat dari aspek pertumbuhannya saja, namun perlu dilihat juga aspek distribusi pendapatan dari perekonomian tersebut. Distribusi pendapatan perlu dilihat untuk menentukan seberapa baik aspek pemerataan dari perekonomian suatu negara, khususnya di Negara Sedang Berkembang. Proses pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan distribusi pendapatan yang porsinya merata di antara pelaku ekonomi.

Pada dasarnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditentukan oleh tingkat pendapatan, dan banyak pendapat yang mendukungnya. Menurut [5], peningkatan pendapatan rumah tangga, cenderung merubah pola konsumsi untuk pangan dan non pangan. Sesuai pendapat Engel, ketika pendapatan meningkat maka proporsi untuk pengeluaran pangan akan menurun, walaupun secara absolut jumlahnya meningkat. [6] mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pola konsumsi dipengaruhi oleh beberapa variabel karakteristik responden yaitu pendapatan, pekerjaan, umur, pendidikan dan jumlah anggota keluarga [7]. [8] mengatakan bahwa komoditas pangan di Jawa Timur bersifat inelastis terhadap harga dan lebih responsif terhadap perubahan pendapatan. Konsumsi rumah

tangga atau penduduk menjadi salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Indikator turunannya adalah konsumsi perkapita penduduk beserta polanya, yaitu pola konsumsi makanan dan bukan makanan dan juga dalam bentuk kalori dan protein.

Selain pola konsumsi, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur dengan tingkat kecukupan gizinya, yang mencakup konsumsi kalori dan protein, yang merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, jenis aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal [9]

Tingkat kecukupan gizi adalah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk atau masyarakat di suatu wilayah. Kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia adalah 2.100 Kkal dan 57 gram protein. Standar angka tersebut merupakan rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2008. [10] mencatat, bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari untuk kalori dan protein sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein harian. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2020 adalah 2.112,06 kkal, sementara untuk konsumsi protein 61,98 gram, dan pada tahun 2021 adalah 2.143,21 kkal dan 62,28 gram.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah meneliti tentang Distribusi PDRB, pendapatan per-kapita, kemiskinan, Gini ratio, Pola konsumsi dan pola konsumsi dalam kalori dan protein secara keseluruhan, dan dibedakan antara pedesaan dengan perkotaan, pola konsumsi bahan makanan dan bahan bukan makanan, antara perdesaan dan perkotaan.

Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah di Indonesia. Pola konsumsi yang dimaksud terdiri dari pola konsumsi makanan dan bukan makanan, dan pola konsumsi makanan dalam bentuk kalori dan protein.

- a. Distribusi PDRB
- b. Pendapatan per-kapita
- c. Gini ratio
- d. Pola Konsumsi dalam kalori dan protein.
- e. Pola konsumsi makanan dan bukan makanan.

Alat analisis menggunakan system tabel silang. Teknik pengumpulan data dengan cara tabulasi, yaitu mengambil data yang telah tersedia di BPS.

Definisi operasional variabel penelitian:

- a. Distribusi prosentase PDRB adalah prosentase PDRB sektor pertanian terhadap PDRB total.
- b. Pendapatan per kapita
- c. Jumlah penduduk miskin
- d. Gini ratio
- e. Konsumsi makanan dalam kalori dan protein adalah konsumsi bahan makanan secara keseluruhan yang dinyatakan dalam Kalori dan Protein.
- f. Pola konsumsi bahan makanan dan bukan bahan makanan. Adalah prosentase pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari bahan makanan secara

- keseluruhan, meliputi bahan makanan pokok dan makanan bukan pokok, dalam satuan prosen (%)
- g. Pola konsumsi bahan non makanan, adalah prosentase pengeluaran yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dari bahan bukan makanan secara keseluruhan, masing-masing dengan satuan persen (%).
 - h. Teknik analisis data dengan menggunakan table silang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosentase PDRB Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Jasa Pendidikan, Pertambangan dan Penggalan di Indonesia tahun 2010 – 2022

Sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang penting dalam perekonomian nasional, akan tetapi perannya dalam pembentukan PDRB di sebagian besar wilayah Indonesia mulai menurun. Hal tersebut diikuti juga dengan penurunan luas lahan panen, baik yang disebabkan karena adanya alih fungsi atau diperjual-belian. Indonesia secara historis dikenal sebagai negara agraris, sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara dan menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi yang mayoritas tanahnya sangat cocok sebagai lahan pertanian.

Tabel 1. Prosentase (%) Kontribusi Sektor Pertanian, Industri pengolahan, Perdagangan, Jasa Pendidikan dan Pertambangan dan Penggalan, 2010 – 2022

No.	Tahun	Pertanian (%)	Industri Pengolahan (%)	Perdagangan Besar dan Eceran (%)	Jasa Pendidikan (%)	Pertambangan dan Penggalan
1.	2010	30.01	0.75	0.54	25.39	27.61
2.	2011	30.15	0.73	0.54	24.19	27.93
3.	2012	-	-	-	-	-
4.	2013	28.32	0.77	0.52	24.81	26.35
5.	2014	27.80	14.18	0.50	25.53	17.75
6.	2015	24.54	15.49	13.61	2.77	15.76
7.	2016	21.61	16.35	15.75	2.62	14.23
8.	2017	19.02	17.63	16.80	2.47	13.44
9.	2018	17.01	18.82	17.77	2.35	13.33
10.	2019	15.51	19.61	18.71	2.24	13.40
11.	2020	16.12	19.75	18.83	2.26	12.37
12.	2021	16.25	19.69	18.66	2.29	13.11
13.	2022	15.71	19.44	18.76	2.18	15.02
Rata-rata						

Sumber : <https://www.bps.go.id/indicator/11/106/14/-seri-2010-distribusi-pdb-triwulanan-seri-2010>

Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi pada suatu daerah ataupun negara. Transformasi ekonomi sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing perekonomian mengalami transformasi yang berbeda-beda. [2] menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan perubahan struktural.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana kesejahteraan masyarakat biasanya dilihat dari aspek ekonomi yang diukur dengan pendapatan perkapita. Untuk mengetahui

pembangunan sebuah negara dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektoral terhadap pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Perubahan kontribusi suatu sektor akan berpengaruh pada perubahan sektor ekonomi suatu negara ataupun daerah. Terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan perubahan structural dalam proses pembangunan[2].

Dalam proses pembangunan, terutama pembangunan ekonomi, kemajuan ekonomi akan diiringi perubahan peranan sub-sektor ekonomi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Semakin maju keadaan ekonomi suatu Negara maka akan diiringi semakin menurunnya kontribusi (%) sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi. Sebaliknya semakin tinggi kontribusi (%) sektor industri peranannya terhadap pembangunan ekonomi. Menurut [2], pertumbuhan ekonomi mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi pada suatu daerah ataupun negara. Transformasi ekonomi sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing perekonomian mengalami transformasi yang berbeda-beda.

Dari tabel 1 nampak bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2010 dan 2011 adalah paling besar 30,01 persen, dan 30,15 persen. Sedangkan industri pengolahan 0,75 persen, perdagangan besar 0,54 persen, jasa pendidikan 25,39 persen dan pertambangan dan penggalian 27,61 persen. Peranan sektor pertanian semakin menurun, pada tahun 2019 sebesar 15,51 persen dan pada tahun 2022 sebesar 15,71 persen. Dari angka-angka tersebut, pertumbuhan ekonomi paling baik adalah pada tahun 2019 dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 15,51 persen.

Sementara itu, peranan sub-sektor industri pengolahan terhadap PDRB total semakin meningkat. Pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 0,75 persen, pada tahun 2011 sebesar 0,73 persen, hingga tahun 2022 peranannya semakin meningkat, namun terjadi fluktuasi yang tidak secara penuh sesuai dengan teori. Misalnya diperhatikan pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 masing-masing peranannya terhadap pembentukan PDRB total 19,61 persen, 19,75 persen, 19,69 persen dan 19,44 persen. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran perannya juga semakin meningkat. Selama 4 tahun awal, peranannya terhadap pembentukan PDRB sangat rendah, yaitu kurang dari 1 persen. Baru pada tahun 2015 peranannya terhadap pembentukan PDRB menaik yaitu menjadi 13,61 %.

3.2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kemakmuran dari hasil pembangunan suatu Negara. Semakin besar pendapatan per kapita suatu Negara, maka semakin tinggi pula tingkat Pendapatan Nasional dan pendapatan rata-rata penduduknya.

Pengaruh pendapatan per kapita terhadap pembangunan, adalah jika semakin tinggi pendapatan perkapita suatu negara maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya, dan sebaliknya apabila semakin rendah pendapatan perkapita suatu negara maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya semakin rendah pula. Pendapatan per kapita juga dapat menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu Negara. Dalam hal ini pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar kemungkinan negara itu memiliki tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi dan pendapatan rata-rata penduduk yang semakin tinggi.

Menurut [3] proses pembangunan di Indonesia selama 10 tahun terakhir dalam bidang ekonomi mengalami perkembangan yang stabil dimana tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010- 2019 sebesar 4%-6%, hanya di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97% disebabkan adanya pandemi covid-19. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh di atas 4% tersebut, tetapi sangat disayangkan karena pertumbuhan ekonomi ini justru membuat ketimpangan distribusi pendapatan rakyat semakin lebar. yang dilihat dari koefisien gini Indonesia dari tahun 2011 sampai

tahun 2015 sebesar di kisaran 0,406-0,41. Namun di tahun 2016 sampai 2020 koefisien gini Indonesia turun, sudah di bawah dari 0,40 yaitu di tahun 2016 sebesar 0,307 dan di tahun 2020 menjadi 0,381.

Tabel 2. Pendapatan Per-Kapita Penduduk di Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

No.	Tahun	Perdesaan	Perkotaan	Indonesia
1	2010	19925.62	11097.77	31023.39
2	2011	18972.18	11046.75	30018.93
3	2012	18086.87	10507.77	28594.64
4	2013	17919.48	10634.49	28553.97
5	2014	10619.86	10356.69	27727.78
6	2015	17893.71	10619.86	28513.57
7	2016	17278.68	10485.64	27764.32
8	2017	16310.44	10272.55	26582.99
9	2018	15543.31	10131.28	25674.58
10	2019	14928.12	9857.75	24785.87
11	2020	15511.19	12038.50	27549.69
12	2021	14644.30	11859.34	26503.65
13	2022	14382.95	11980.32	26363.27

Sumber: Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

3.3. Gini Ratio

Strategi pembangunan yang berorientasi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara sadar atau tidak akan mengarahkan semua upaya pemerintah, swasta, BUMN, koperasi, dan masyarakat untuk mengukur kemajuan hanya dengan melihat pencapaian PDRB saja. Pembangunan dalam lingkup spasial memang tidak selalu merata, Ketimpangan Pendapatan antar wilayah menjadi salah satu permasalahan yang sangat serius. Persoalan ketimpangan punya makna yang lebih dari sekedar deretan angka. Hal itu berhubungan erat dengan masalah keadilan, keterbukaan informasi, serta pemerataan kesempatan dan akses dari sebuah proses perubahan yang bernama pembangunan. (Axel J. Lala, dkk. 2023)

Tabel 3. Gini Ratio Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Perkotaan dan Perdesaan.

No.	Tahun	Perdesaan	Perkotaan	Indonesia (Perdesaan + Perkotaan)
1.	2010	0.315	0.382	0.378
2.	2011	0.329	0.396	0.388
3.	2012	0.327	0.425	0.413
4.	2013	0.324	0.424	0.406
5.	2014	0.336	0.433	0.414
6.	2015	0.329	0.419	0.402
7.	2016	0.316	0.409	0.394
8.	2017	0.320	0.404	0.391
9.	2018	0.319	0.391	0.384
10.	2019	0.315	0.391	0.380
11.	2020	0.319	0.399	0.385
12.	2021	0.314	0.398	0.385
13.	2022	0.313	0.402	0.381

*) Semester ke dua

Sumber: Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Indeks Gini (*gini ratio*) adalah merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Tingkat pemerataan distribusi

pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini ratio bernilai 0 artinya proses pemerataan terjadi secara sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 artinya ketimpangan benar-benar sempurna terjadi.

Dari table 3 tampak bahwa di Perdesaan distribusi pendapatan paling baik adalah terjadi pada tahun 2010 dengan gini ratio 0,315 dan tahun 2019 dengan gini ratio 0,315, tahun 2021 dengan gini ratio 0,314 dan tahun 2022 dengan gini ratio 0,313. Sementara itu di Perkotaan distribusi pendapatan paling baik adalah tahun 2010 dengan gini ratio 0,382, tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing dengan gini ratio 0,391. Untuk seluruh Indonesia, distribusi pendapatan paling baik adalah tahun 2010 dengan gini ratio 0,378, kemudian tahun 2019 dengan Gini Ratio 0,380 kemudian terakhir adalah tahun 2022 yaitu dengan Gini Ratio 0,381.

3.4. Pola Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan (%)

Pola konsumsi di masyarakat suatu daerah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut. Keadaan masyarakat suatu wilayah semakin sejahtera apabila pola konsumsi (%) bahan pangan semakin kecil atau rendah. Dan sebaliknya pola konsumsi (%) untuk bahan bukan makanan semakin besar. Pada tabel 4 nampak bahwa berdasarkan besarnya pola konsumsi makanan, di Perdesaan paling sejahtera adalah terjadi pada tahun 2020 dengan pola konsumsi makanan 55,49 persen dan pola konsumsi bukan makanan sebesar 44,51 persen. Sementara itu untuk daerah Perkotaan, tingkat kesejahteraan masyarakat paling tinggi terjadi pada 2015 dengan pola konsumsi makanan 42,55 persen dan bukan makanan sebesar 53,46 persen.

Suatu daerah atau kawasan, negara telah mencapai kesejahteraan apabila peningkatan pendapatan tidak berpengaruh terhadap pola konsumsi. Peningkatan pendapatan akan berpengaruh pada peningkatan prosentase konsumsi bahan bukan pangan dan penurunan prosentase konsumsi

bahan pangan, walaupun secara kuantitas jumlah untuk konsumsi bahan pangan meningkat. Menurut [5] peningkatan pendapatan rumah tangga, secara umum akan cenderung merubah pola konsumsi khususnya jika dilihat dari pola konsumsi untuk pangan dan non pangan. Menurut Engel, sesuai dengan penelitian yang dilakukannya, dinyatakan bahwa ketika pendapatan meningkat maka proporsi untuk pengeluaran pangan akan menurun, walaupun secara absolut jumlahnya meningkat. Penurunan proporsi pengeluaran untuk pangan akan diikuti dengan peningkatan proporsi pengeluaran untuk non pangan. [11] menemukan bahwa pola konsumsi pangan padi-padian dan umbi-umbian berdasarkan pendapatan, semakin tinggi atau semakin menurun.

Suatu daerah atau kawasan, negara telah mencapai kesejahteraan apabila peningkatan pendapatan tidak berpengaruh terhadap perubahan pola konsumsi. Peningkatan pendapatan akan berpengaruh terhadap peningkatan prosentase konsumsi bahan bukan pangan dan penurunan prosentase konsumsi bahan pangan, walaupun secara kuantitas jumlah untuk konsumsi bahan pangan meningkat. Menurut [5], peningkatan pendapatan rumah tangga, secara umum akan cenderung merubah pola konsumsi khususnya jika dilihat dari pola konsumsi untuk pangan dan non pangan. Menurut Engel, sesuai dengan penelitian yang dilakukannya, dinyatakan bahwa ketika pendapatan meningkat maka proporsi untuk pengeluaran pangan akan menurun, walaupun secara absolut jumlahnya meningkat. Penurunan proporsi pengeluaran untuk pangan akan diikuti dengan peningkatan proporsi pengeluaran untuk non pangan. [11] menemukan bahwa pola konsumsi pangan padi-padian dan umbi-umbian berdasarkan pendapatan, semakin tinggi pendapatan pangsa pengeluaran komoditi beras, tepung terigu, dan singkong di Provinsi Riau semakin menurun.

Tabel 4. Pola Konsumsi Penduduk Indonesia Di Perdesaan dan Perkotaan, 2010 – 2022

No.	Tahun	Perdesaan		Perkotaan		Indonesia	
		Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan	Makanan	Bukan Makanan
1	2010	59,19	40,81	46,52	53,48	52,85	51,15
2	2011	58,00	42,00	44,39	55,61	49,45	50,55
3	2012	59,01	40,99	46,51	53,49	51,08	48,92
4	2013	59,18	40,82	45,86	54,14	50,66	49,34
5	2014	58,81	41,19	44,93	55,07	50,04	49,06
6	2015	55,63	44,37	42,55	57,45	47,47	52,53
7	2016	55,83	44,17	44,57	55,43	48,08	51,92
8	2017	58,66	41,34	46,70	53,30	50,94	49,06
9	2018	56,28	43,72	45,98	54,02	49,51	50,49
10	2019	55,59	44,41	45,90	54,10	49,14	50,86
11	2020	55,49	44,51	46,05	53,95	49,22	50,78
12	2021	56,20	43,80	45,81	54,19	51,01	48,09
13	2022	57,45	42,55	46,54	53,46	51,99	48,01

Sumber: Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

3.5. Pola konsumsi bahan makanan dalam bentuk kalori dan protein

Status gizi secara tidak langsung memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan dan kondisi kesehatan masyarakat. Status kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk. Penentuan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari menggunakan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein. Secara nasional rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2 079,09 kkal berada di bawah standar kecukupan, tetapi untuk konsumsi protein sebesar 62,21 gram, sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein nasional [10].

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, jenis aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal [9].

Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga merupakan bagian dari parameter keberhasilan ketahanan pangan. Konsumsi pangan mencerminkan kemampuan dan kemampuan rumah tangga untuk membeli dan memperoleh pangan. Tingginya ketersediaan pangan suatu daerah belum menjamin cukupnya ketersediaan pangan dalam rumah tangga [12]. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2020 adalah 2.112,06 kkal, sementara untuk konsumsi protein 61,98 gram, dan pada tahun 2021 adalah 2.143,21 kkal dan 62,28 gram. Dari table 6 nampak bahwa dari tahun 2017 – 2021 baik dari jumlah kalori dan protein telah mencapai kecukupan atau di atas ukuran standar nasional.

Kalori merupakan satuan ukur untuk menyatakan nilai energi. Dalam ilmu gizi, kalori adalah energi yang diperoleh dari makanan dan minuman serta penggunaan energi dalam aktivitas fisik. Tubuh kita memerlukan kalori untuk menghasilkan energi. Kalori dapat dianalogikan sebagai bahan bakar bagi tubuh, kekurangan kalori akan menjadikan tubuh lemah dan daya tahan tubuh menurun.

Energi mempunyai peran penting dalam kehidupan, tanpa energi, sel-sel tubuh bisa mati, sistem-sistem organ dalam tubuh bisa berhenti, serta tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Asupan kalori yang tidak tepat akan mempengaruhi kesehatan. Kelebihan kalori juga tidak baik bagi kesehatan. Dampak yang paling mudah terlihat akibat kelebihan kalori adalah obesitas. Orang yang mengalami obesitas umumnya rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif. Sementara itu, Protein merupakan kunci nutrisi penting yang berguna untuk pembentukan sel-sel baru dalam tubuh, memengaruhi kerja enzim, hormon, dan kekebalan tubuh. Protein juga merupakan zat gizi yang penting bagi tubuh, terutama untuk mengembangkan dan memperbaiki jaringan tubuh. Dampak terburuk dari kekurangan protein adalah penyakit busung lapar dan marasmus yang dapat berujung pada kematian. Konsumsi protein yang berlebihan juga berdampak buruk bagi tubuh, terutama mengganggu kerja ginjal [10]. Sementara itu, Asupan kalori yang tidak tepat akan mempengaruhi kesehatan. Kelebihan kalori juga tidak baik bagi kesehatan. Dampak yang paling mudah terlihat akibat kelebihan kalori adalah obesitas. Orang yang mengalami obesitas umumnya rentan terhadap berbagai penyakit degenerative [10].

Tabel 5. Pola Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia, Tahun 2011 – 2021

No.	Tahun	Kalori (Kalori)	Protein (gram)
1.	2011	1952,01	53,81
2.	2012	1852,64	53,14
3.	2013	1842,75	60,06
4.	2014	1859,30	53,91
5.	2015	1992,69	55,11
6.	2016	2037,40	56,67
7.	2017	2152,64	62,20
8.	2018	2147,09	62,19
9.	2019	2120,52	62,13
10.	2020	2112,06	61,98
11.	2021	2143,21	62,28

Sumber : Publikasi Statistik Indonesia, 2021.

Secara keseluruhan, atau social dan secara pribadi atau individu, tingkat kecukupan konsumsi kalori atau energi dan protein harus diupayakan tingkat kecukupannya. Hal ini selain dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi, juga yang lebih penting adalah kualitas kehidupan masyarakat dapat tercapai sehingga dapat berperan dan sekaligus mendukung keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan.

Apabila diperhatikan dari masing-masing provinsi di Seluruh Indonesia, banyak provinsi yang telah mencapai kondisi di atas angka standar Nasional. Provinsi-provinsi berikut telah dapat mencapai ukuran standar, antara lain : (a) Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 telah konsumsi kalori sebanyak 2143,98 Kalori dan 65,25 gram protein, (b) Di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, konsumsi kalori masing-masing adalah 2 223,32 Kalori, 2 213,98 Kalori, 2 072,28 Kalori dan 2 143,98 Kalori, dan untuk konsumsi proteinnya masing-masing adalah 70,51 gram, 64, 79 gram, 59, 28 gram dan 60,68 gram. Nampak bahwa di Jawa jumlah kalori yang dapat dikonsumsi telah memenuhi standar jumlah (lebih dari jumlah standar yang ditetapkan) kecuali di Jawa Tengah. Sementara itu jumlah konsumsi protein semuanya berada di atas angka standar yang telah ditetapkan.

Propinsi paling tinggi konsumsi kalori adalah propinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah konsumsi kalori 2 542, 98 Kkalori. Namun masih banyak propinsi dengan jumlah konsumsi kalori di

bawah standar kecukupan, yaitu ada 14 propinsi, antara lain : Riau (2 079,53 Kalori), Lampung (2 097,21 Kalori), Jawa Tengah 2072,28 Kalori, Nusa Tenggara Timur (2 020,33 Kalori), Kalimantan Barat 1941,40 Kalori, Kalimantan Selatan 1981,64 Kalori, Kalimantan Timur 2023,44 Kalori, Sulawesi Utara 2008,55, Sulawesi Selatan 2046,29 Kalori, Sulawesi Tenggara 2009,24 Kalori, Gorontalo 2098,41 Kalori, Sulawesi Barat 1874,88 Kalori, Maluku Utara 1862,15 Kalori, Maluku Barat 1911,04 Kalori, dan Papua 1879,71 Kalori [10].

Propinsi paling tinggi konsumsi kalori di perkotaan dalam sepuluh besar adalah propinsi : 1. Nusa Tenggara Barat, 2 579,22 Kkalori, 2. DKI, 2.223,32 Kkalori, 3. Banten, 2.221,47 Kkalori, 4. Kalimantan Selatan, 2.215,78 Kkalori, 5. Jawa Barat, 2.183,59 Kkalori, 6. Bali , 2.165,75 Kkalori, 7. Kepulauan Riau, 2.156,15 Kkalori, 8. DIY, 2.154,82 Kkalori, 9. Sulawesi Selatan, 2.153,38 Kkalori, dan 10. Sumatra Selatan, 2.150,27 Kkalori. Sedangkan di Perdesaan, secara berturut-turut adalah propinsi : 1. Nusa Tenggara Barat, 2.507,10, 2. Kalimantan Selatan, 2.371,16 Kkalori, 3. Banten, 2.353,87 Kkalori, 4. Jawa Barat, 2.322,48 Kkalori, 5. Sumatra Selatan, 2.281,24 Kkalori, 6. Bali, 2.271,26 Kkalori, 7. Kalimantan Tengah, 2.237,96 Kkalori, 8. Bengkulu, 2.180,86 Kkalori, 9. Sulawesi Selatan, 2.137,52 Kkalori, dan 10. DIY, 2.112,93 Kkalori [10].

Sedangkan, konsumsi protein sepuluh besar di perkotaan, berturut-turut adalah : 1. NTB, 79, 33 gram, 2. Kepulauan Riau, 71,23 gram, 3. DKI, 70,51 gram, 4. Kalimantan Selatan, 69, 49 gram, 5. Banten, 67,43 gram, 6. DIY, 67,30 gram, 7. Kep. Bangka Belitung, 65,55 gram, 8. Kalimantan Tengah, 65,26 gram, 9. Aceh, 65,21 gram, dan 10. Jawa Barat, 64,42 gram. Sedangkan di daerah Perdesaan, sepuluh besar propinsi adalah : 1. NTB, 74,27 gram, 2. Kalimantan Selatan, 69,21 gram, 3. Jawa Barat, 66,14 gram, 4. Banten, 64,83 gram, 5. Kepulauan Bangka Belitung, 63,45 gram, 6. Sumatra Selatan, 63,38 gram, 7. Kalimantan Tengah, 63,03 gram, 8. Bali, 62,71 gram, 9. Aceh, 61,92 gram, dan 10. Sumatra Utara, 61,87 gram [10].

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dapat diperoleh, maka dapat dirumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB nasional, pembangunan Ekonomi semakin menurun bersamaan dengan kenaikan nilai PDRB.
2. Keberhasilan dalam proses pembangunan ekonomi akan diikuti dengan kenaikan pendapatan nasional dan sekaligus pendapatan per-kapita nasional.
3. Selain peningkatan pendapatan nasional dan peningkatan pendapatan per-kapita, keberhasilan pembangunan ekonomi juga diikuti dengan pemerataan pendapatan nasional.
4. Keberhasilan dalam proses pembangunan juga ditandai adanya pergeseran pola konsumsi dari makanan ke konsumsi bukan makanan.
5. Keberhasilan dalam proses pembangunan disamping pergeseran pola konsumsi dari makanan ke konsumsi bukan makanan, juga ditandai adanya kenaikan tingkat konsumsi bahan makanan dalam kalori dan protein.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada LPPM Universitas Widyagama Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan tulisan di Jurnal ***CIASTECH 2023***, Alhamdulillah dapat membantu termuatnya makalah kami. Semoga dapat mendatangkan banyak manfaat kepada semua pihak, Aaamin.

6. REFERENSI

- [1] A. Suwandi and dkk, "Peranan Dan Kendala Pengembangan Agroindustri Di Indonesia," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2022.
- [2] A. dan D. D. I. Fatmawati, "ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI (ECONOMIC LANDSCAPE) JAWA TENGAH (Analisis Input-Output Periode Tahun 2000-2013," *F. JDEP*, vol. 1, no. 3, pp. 46–70, 2018.
- [3] S. E. Rahayu, "Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia," *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, p. 1, 2021.
- [4] M. F. R. Salim Fauzanul Ihsani, *Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia : Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19*. Jurnal Ekonomi-Qu, 2022.
- [5] I. B. E. A. Ida Ayu Ketut Marini, "Implikasi Ekonomi Dari Pola Konsumsi Pangan Dan Non Pangan Masyarakat Kota Mataram Tahun." p. 2022, 2023.
- [6] L. Anggalisa and L. Marwan, "Analisis Konsumsi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. mor 2, 2023.
- [7] A. D. Arrosyid and P. Pardian, "Analisis Perubahan Pola Konsumsi Rumah Tangga Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kel. Baru, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, vol. 9, no. 2, pp. 699–712, 2022.
- [8] D. Mayasaria and D. S. Iswan Noora, "Analisis Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Status IPM di Jawa Timur The Pattern of Food Consumption Based on HDI in East Java," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 18, no. 2, pp. 191–213, 2018.
- [9] B.P.S D.I.Y, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta*. BPS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020.
- [10] B.P.S., "Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi." 2022.
- [11] F. Munidestari, D. Bakce, and Novian, "Analisis Pola Konsumsi Pangan Padi-Padian Dan Umbi-Umbian Rumah Tangga Di Provinsi Riau," *Jurnal Agribisnis*, vol. 24, no. : 1, 2022.
- [12] F. Lekama, I. W. Nampa, and M. F. Darlen, "Ketersediaan Dan Pola Konsumsi Pangan Pokok Pada Rumah Tangga Petani Di Desa Benu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang," vol. 11, no. 2. 2023.